



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayon Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el diskominfo@medan.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**  
Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2026

Pihak Kedua

**WALI KOTA MEDAN**

**RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA**

**ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**  
**NIP 19780730 199612 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
Tahun Anggaran : 2026

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (5)
1	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE	3,82 – 3,92
2	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,20
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	80%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 33.916.888.023	-
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 701.204.375	-
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 12.450.468.205	-
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 1.243.369.798	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 24.827.472.087	-

Medan, 30 Januari 2026

**WALI KOTA MEDAN**

**RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**



**KEPALA DINAS**

**ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**  
**NIP. 19780730 199612 1 001**

LAMPIRAN I

I. PENJELASAN PERHITUNGAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks SPBE	3,82 – 3,92  <b>Baseline 2025 :</b> Nilai Indeks hasil penilaian interviu SPBE Kota Medan yakni sebesar Nilai Indeks : <b>3,67 (Sangat Baik).</b>	Misi Ramah	Tujuan 9 dan Tujuan 16	<p>1. Indeks SPBE merupakan dukungan <b>Misi Ramah</b> dalam RPJMD yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Data, Riset melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan modern, dan Indeks SPBE mendukung SDGs Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)</p> <p>2. SDGs <b>Tujuan 9 dan 16</b> (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Ini karena SPBE berfokus pada peningkatan infrastruktur digital untuk layanan publik, yang mengarah pada inovasi (<b>Tujuan 9</b>) serta efisiensi dan akuntabilitas layanan pemerintahan (<b>Tujuan 16</b>)</p>
2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,20	Misi Ramah	Tujuan 17	<p>1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan dukungan <b>Misi Ramah</b> dalam RPJMD yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Data, Riset . IPS berfungsi untuk</p>

		<p><b>Baseline 2025 :</b> Indeks Pembangunan Statistik (IPS) diperoleh sebesar 2,94 dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari BPS.</p>			<p>mengukur kualitas, ketersediaan, dan penyampaian data statistik yang diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan-tujuan</p> <p>2. SDGs <b>Tujuan 17</b> Kemitraan untuk mencapai tujuan. IPS berfokus pada penguatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kemitraan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, lembaga, dan masyarakat sipil, untuk memastikan data statistik yang akurat dan dapat diandalkan tersedia bagi semua</p>
3.	<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Informatif</p>	<p>Misi Ramah</p>	<p>Tujuan 16</p>	<p>1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan dukungan <b>Misi Ramah</b> dalam RPJMD yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Data, Riset . keterbukaan informasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan iklim investasi dan bisnis yang lebih baik di Kota Medan.</p> <p>2. SDGs <b>Tujuan 16</b> Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang</p>

		<p><b>Baseline 2025 :</b> Informatif</p> <p>(Penilaian dari Komisi Informasi Publik)</p>			<p>Tanggung karena keterbukaan informasi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik mendukung SDGs melalui beberapa cara utama, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menyediakan data yang akurat untuk pemantauan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan publik dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara terbuka, yang pada akhirnya dapat mencegah korupsi dan memastikan pembangunan yang lebih inklusif.</p>
4.	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p>	BB	Misi Ramah	Tujuan 16	<p>1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan dukungan <b>Misi Ramah</b> dalam RPJMD yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Data, Riset. Instansi pemerintah harus memiliki sistem akuntabilitas yang baik, seperti SAKIP, untuk mengukur kinerja</p>

		<p><b>Baseline 2025 :</b>          Nilai SAKIP          Mendapat Nilai BB</p>			<p>dan memastikan pertanggungjawaban terhadap tujuan yang ditetapkan.</p> <p>2.SDGs <b>Tujuan 16</b> Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh karena keterbukaan informasi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. SAKIP secara langsung berkontribusi pada tujuan ini karena fokus pada pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik untuk mencapai semua tujuan lainnya. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukung semua 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), karena SAKIP bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien, yang merupakan fondasi penting untuk mencapai semua tujuan SDGs.</p>
5.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	80%	Misi Ramah	Tujuan 16	1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah merupakan dukungan <b>Misi Ramah</b> dalam RPJMD yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan

		<p><b>Baseline 2025 :</b> Diperoleh dari Hasil Evaluasi Indeks KAMI sebesar 87,58%</p>			<p>dan Pelayanan Publik Berbasis Data, Riset. keamanan informasi merupakan fondasi penting untuk membangun sistem pemerintahan yang modern dan akuntabel.</p> <p>2.</p> <p>3. SDGs <b>Tujuan 16:</b> Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dari SDGs, karena keamanan informasi yang baik memastikan kelembagaan pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Keamanan informasi yang kuat juga mendukung keamanan dan stabilitas publik serta hak akses terhadap informasi.</p>
--	--	--	--	--	--

## LAMPIRAN II

### II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Indeks SPBE	3,82 – 3,92	Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 59 Tahun 2020 dan melibatkan penilaian. Instrument pengukuran ini diuraikan lebih terperinci pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan hasil penilaian SPBE yang ditetapkan melalui Peraturan KemenPANRB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,20	<p>Perhitungan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan penilaian terhadap beberapa domain indikator. Rincian domain indikator dan bobot penilaian IPS dimaksud antara lain : Prinsip SDI (28%), Kualitas Data (24%), Proses Bisnis Statistik (19%), Kelembagaan (17%), dan Statistik Nasional (12%).</p> <p>Adapun indeks hasil EPSS tersebut memiliki jangkauan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai 4.2 – 5,0 termasuk Predikat Memuaskan</li> <li>2. Nilai 3,5 – &lt;4,2 termasuk Predikat Sangat Baik</li> <li>3. Nilai 2,6 – &lt;3,5 termasuk Predikat Baik</li> <li>4. Nilai 1,8 – &lt;2,6 termasuk Predikat Cukup</li> <li>5. Nilai &lt;1,8 termasuk Predikat Kurang</li> </ol>

3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	<p>Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara selaku Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rumus perhitungan Nilai Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pembobotan beberapa komponen penilaian, yang mencakup penilaian kuesioner dan penilaian presentasi uji publik. Berdasarkan sistem yang ada, penilaian kuesioner berkontribusi 80% dan penilaian presentasi berkontribusi 20% dari total nilai. Penilaian kuesioner sendiri dirinci lebih lanjut, di mana 40% bobotnya untuk indikator pengembangan website dan pengumuman informasi publik, dan 40% lainnya untuk indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik.</p> <p><b>Nilai Akhir = (Bobot Penilaian Kuesioner x Nilai Kuesioner) + (Bobot Penilaian Presentasi x Nilai Presentasi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bobot Penilaian Kuesioner: 80% (0,8)</li> <li>• Bobot Penilaian Presentasi: 20% (0,2)</li> </ul> <p>Rincian penilaian kuesioner (total bobot 40% + 40% = 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi Publik: 40%</li> <li>• Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik: 40%</li> </ul> <p>Kualifikasi hasil penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informatif:</b> Nilai antara 90–100</li> <li>• <b>Menuju Informatif:</b> Nilai antara 80–89,9</li> <li>• <b>Cukup Informatif:</b> Nilai antara 60–79,9</li> <li>• <b>Kurang Informatif:</b> Nilai antara 40–59,9</li> <li>• <b>Tidak Informatif:</b> Nilai kurang dari 39,9</li> </ul>
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Perhitungan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dengan menjumlahkan skor dari setiap komponen penilaian, yang kemudian dikalikan dengan bobotnya

			<p>masing-masing. Penilaian ini mencakup komponen utama seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, yang kemudian dirata-ratakan menjadi nilai akhir dengan kategori.</p> <p>SAKIP dievaluasi berdasarkan beberapa komponen utama, yang masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda yaitu :  Perencanaan Kinerja 20%, Pengukuran Kinerja 30 %, Pelaporan Kinerja 50% dan Evaluasi Kinerja 30%.</p> <p><b>Nilai Akhir = (skor1 x bobot1) + (skor2 x bobot2) + (skor3 x bobot 3) + (skor4 x bobot4) + (skor5 x bobot5)</b></p> <p>Konversi ke kategori AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Nilai akhir yang didapat kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian AKIP yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (Sangat Memuaskan), Nilai &gt; 90 – 100</li> <li>2. A (Memuaskan), Nilai &gt;80 - 90</li> <li>3. BB (Sangat Baik), Nilai &gt;70 – 80</li> <li>4. B (Baik), Nilai &gt; 60 -70</li> <li>5. CC (Cukup), Nilai &gt;50 – 60</li> <li>6. C (Kurang), Nilai &gt;30 – 50</li> <li>7. D (Sangat Kurang, Nilai &gt;0 - 30</li> </ol>
5.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	80%	<p>Rumusan perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah melibatkan evaluasi berdasarkan standar keamanan ISO/IEC 27001:2022 yang meliputi penilaian kesiapan kontrol, konsistensi penerapan, dan kemampuan perbaikan berkelanjutan. Perhitungan ini biasanya terdiri dari langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Identifikasi dan penilaian risiko:</b> Melakukan identifikasi aset penting (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan potensi ancaman serta kerentanan yang ada.</li> <li>2. <b>Penentuan standar dan kontrol:</b> Menggunakan standar internasional seperti ISO 27001 untuk menentukan standar dan kontrol keamanan yang harus diterapkan</li> </ol>

			<p>3. <b>Penilaian dan perhitungan skor:</b> Melakukan survei atau audit untuk menilai tingkat penerapan kontrol yang sudah ada. Responden memberikan skor pada setiap area, yang kemudian dikonsolidasi untuk menghasilkan indeks keseluruhan.</p> <p>4. <b>Pengelompokan berdasarkan tingkat kematangan:</b> Hasil perhitungan dikelompokkan berdasarkan tingkatan kematangan keamanan, yang dapat mengacu pada standar ISO/IEC 27001 atau kerangka kerja seperti COBIT atau CMMI</p> <p>5. <b>Evaluasi dan pemantauan:</b> Mengevaluasi hasil perhitungan untuk mengukur kesiapan keamanan dan melakukan pemantauan serta perbaikan berkelanjutan</p> <p>Aspek keamanan yang dievaluasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prinsip keamanan:</b> Penilaian sering didasarkan pada prinsip-prinsip keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, serta keaslian dan tidak dapat disangkalnya (non-repudiation) data.</li><li>• <b>Identifikasi ancaman dan kerentanan:</b> Penilaian mencakup identifikasi potensi ancaman (seperti malware, serangan ransomware, dan ancaman internal) dan kerentanan dalam aset seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, mengacu pada riset.</li></ul>
--	--	--	--









SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN																	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 Persentase	Diseminasi dan publikasi data sektoral	49.968.125	Bidang Statistik dan Informasi Publik							v	v				v	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	140 Orang	Pelatihan dan bimbingan untuk membina dan menguatkan tata kelola data pada Perangkat Daerah	175.189.625	Bidang Statistik dan Informasi Publik		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 Persentase	Diseminasi dan publikasi data geospasial	268.428.125	Bidang Statistik dan Informasi Publik		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah					<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi</b>	<b>66 Indeks</b>	<b>Penyelenggaraan Pengamanan dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Persandian Pemerintah Kota Medan</b>	<b>1.243.369.798</b>		v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
						<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik</b>	<b>90%</b>	<b>Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota</b>	<b>887.419.798</b>					v	v	v	v	v	v				
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	- Melaksanakan kegiatan: 1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE ; 2. Melakukan Pengamanan Sinyal dan Kegiatan Kontra Pengindraan; 3. Sosialisasi Pengembangan Kompetensi SDM Khusus Personil Bidang Persandian; - Pengadaan Perangkat Keamanan Persandian (Metal Detector) - Pendukung Penetration Testing (Lisensi)	100.000.000	Bidang Persandian						v		v	v				
						Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	Pengadaan Handy Talkie untuk kegiatan APEKSI di Kota Medan Tahun 2026, serta pengadaan Radio Rig dan Repeater	415.495.625	Bidang Persandian					v	v	v	v					











